**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KARAKTER EKSEKUTIF,
UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)
(Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI
Tahun 2012-2016)**

Eka Fitri Mardiana Lestari¹⁾, Zirman²⁾, Rusli²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univeristas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univeristas Riau

Email : efml12@yahoo.com

*The Effect Of Corporate Governance, Excecutive Character, Firm Size, And Leverage On
The Extent Of Tax Avoidance (Study On Minning
Companies Listed In Indonesia Stock Exchange In 2012-2016)*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of corporate governance, excecutive characters, firm size, and leverage on the extent of tax avoidance with proxy book tax gap. The population in this study is the Registered Minning companies in Indonesia Stock Exchange in 2012 until 2016. The sample was determined by the purposive sampling method and obtain 30 companies. Type of data used was secondary data obtained from www.idx.co.id or corporate websites. The method of analysis used is multiple regression analysis. The results of study show that institusional ownership has significant effect on tax avoidance, where the significant value are $0,026 < 0,05$. Quality auditte has significant effect on tax avoidance, where the significant value are $0,028 < 0,05$. Independent commisaries has a significant effect on tax avoidance, where the significant value are $0,121 > 0,05$. Audit commite has no significant effect on tax avoidance, where the significant value are $0,021 < 0,05$. Exchecutive charachters has signifikan effect on tax avoidance, where the significant value are $0,512 > 0,05$. Firm size has significant effect on tax avoidance, where the significant value are $0,040 < 0,05$. Leverage has no significant effect on tax avoidance, where the significant value are $0,036 < 0,05$.

Keywords : corporate governance, exchecutive charachters, firm size, leverage, and tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan dalam suatu Negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia yang luas dan melimpahnya sumber daya alam menjadi keunggulan yang dimiliki negara Indonesia. Berlimpahnya kekayaan alam di Indonesia ini menjadi salah satu faktor yang mendorong para

investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, hal ini yang kemudian meningkatkan potensi untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor perpajakan. Penggalan sumber dana melalui sektor pajak merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional di samping penerimaan dari sumber migas dan non migas (Surbakti, 2012). Pajak merupakan pungutan

Negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan Negara. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Annisa dan Kurniasih, 2012). Berita mengenai penghindaran pajak dimuat dalam laporan *global financial integrity* yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat ke delapan dari 25 negara sebagai salah satu negara berkembang yang paling dirugikan oleh adanya praktik penghindaran pajak dengan potensial kerugian sebesar US\$18,78 miliar atau setara Rp 178,41 triliun (www.tempo.com). Selain itu, berdasarkan laporan *Internasional Consortium Of Investigative Journalists* (ICIJ) April 2013, menyebutkan bahwa sejumlah milyuner Indonesia menempatkan dananya pada negara surga pajak, guna meminimalisir jumlah pajak dan memaksimalkan keuntungan (www.bisnis.com). Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berkembang pada saat ini perusahaan tambang yang abai membayar pajak. Yang tidak tertib membayar pajak di republik ini bukan rakyat kecil, melainkan korporasi besar.

seperti, tunggakan pajak perusahaan tambang Bakrie Group. Tahun 2009, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di bawah kepemimpinan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap BUMI Resources, Kaltim Prima Coal (KPC), dan Arutmin terindikasi penghindaran pajak senilai Rp 2,176 triliun. Menurut laporan Ditjen Pajak, tunggakan pajak paling besar adalah KPC senilai Rp 1,5 triliun, sementara Bumi Resources Rp 376 miliar dan Arutmin Rp 300 miliar. Dilihat dari penelitian - penelitian terdahulu, banyak faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman (2014), menunjukkan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014), menunjukkan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan *corporate governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Swingly (2015), menunjukkan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh karakter eksekutif, ukuran perusahaan, dan leverage. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, penelitian ini lebih berfokus pada *corporate governance* yang diprosikan dengan (kepemilikan institusional, kualitas audit, komisaris independen, dan komite audit), karakter eksekutif, ukuran perusahaan, dan leverage. *Corporate governance* berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*). Masalah dalam *corporate governance* terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan kepemilikan institusional. Menurut Pohan (2009: 114) “kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder* (investor dengan posisi

kepemilikan saham paling sedikit 5%). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik. Kualitas audit seperti dikatakan oleh De Angelo (1981) dalam Alim dkk. (2007), yaitu sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit pada berbagai penelitian sebelumnya sering dikaitkan dengan ukuran KAP, dimana KAP yang tergolong *big four* memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan *non big four*. Hal tersebut didasari pemikiran bahwa KAP *big four* memiliki rasio *partner* yang lebih banyak dibanding *non big for* serta jumlah spesialisasi audit yang beragam serta audit mutu yang lebih ketat dibandingkan *non big four*. Dewan komisaris yang berperan sebagai *agent* dalam suatu perusahaan diberi wewenang untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik, namun agent tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan tersebut tentulah melibatkan pimpinan-pimpinan perusahaan didalamnya sebagai pengambil keputusan. Pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut tentu saja memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mungkin sulit dibayangkan bagaimana bisa pimpinan eksekutif suatu perusahaan mempengaruhi *tax avoidance*. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain Hasibuan (2009) dalam

Surbakti (2012). Perusahaan besar memiliki aset yang besar sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar. Dalam aset terdapat aset tetap yang mengalami penyusutan kecuali tanah yang dapat dibiayakan dalam perpajakan. Sehingga perusahaan berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak. *Leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan (Fakhrudin, 2008:109). Dengan adanya pinjaman berupa utang ini tentu dikenakan beban bunga. Bunga yang timbul ini, merupakan salah satu bentuk pemanfaatan *deductible expense*. Perusahaan akan membebarkannya sehingga dapat meminimalkan pajak yang terutang sehingga diindikasikan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberi judul penelitian ini “**Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak**”(Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016).

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain: 1) Apakah kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 2) Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ? 3) Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 4) Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 5) Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak ? 6) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ? 7) Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak ? Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk menguji pengaruh kepemilikan saham institusional terhadap penghindaran pajak. 2) Untuk

menguji pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak. 3) Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak. 4) Untuk menguji komite audit pengaruh terhadap penghindaran pajak. 5) Untuk menguji pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. 6) Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. 7) Untuk menguji pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Faisal (2004: 199) dalam Ngadiman (2014), kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Ngadiman (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

H₁: Kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014). Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahun sebelumnya. Oleh Karena itu, kualitas audit diukur dengan menggunakan variable *dummy* yang bernilai 1 apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* yaitu *Price Water House Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernst & Young -E&Y*, dan bernilai 0 apabila audit laporan keuangan tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four*. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Sartori (2010) menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

H₂: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Untuk itu persentasi dewan komisaris dalam suatu perusahaan secara tidak langsung mempengaruhi manajemen

pajak. Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris maka dimungkinkan akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012).

H₃: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (tax avoidance)

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit bertugas melakukan *control* dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance* (Andriyani, 2008).

H₄: Komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Karakter eksekutif dibedakan menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang (Dewi dan I Ketut, 2014). Berkebalikan dengan *risk taker*, eksekutif yang bersifat *risk averse* akan lebih memilih untuk menghindari segala bentuk kesempatan yang berpotensi menimbulkan resiko dan lebih suka menahan sebagian besar aset yang dimiliki dalam investasi yang relatif aman untuk menghindari pendanaan dari utang, ketidakpastian jumlah *return* dan sebagainya. Semakin eksekutif bersifat *risk taker*, dapat disimpulkan maka

semakin tinggi tingkat *tax avoidance* (Low, 2009; Carolina et al. 2014).

H₅: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Hasibuan (2009) dalam surbakti (2013), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Dalam melakukan *tax planning* untuk upaya menekan beban pajak seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Hasil penelitian Surbakti (2012) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₆: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage adalah tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* menggambarkan tingkat resiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Surbakti, 2012). Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Surbakti (2012) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

H_7 : leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2016 sebanyak 30 perusahaan. Metode penentuan sampel adalah Non Probability berupa purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan kriteria (Sugiyono, 2009: 122). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdapat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan audited yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 dan dapat diakses dari *www.idx.co.id* atau dari website masing-masing perusahaan. Metode analisis data digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut : $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$

Keterangan :

Y = Tax avoidance (BTG)

α = Konstanta

X_1 = kepemilikan saham institusional

X_2 = kualitas audit

X_3 = Komisaris independen

X_4 = Komite audit

X_5 = karakter eksekutif

X_6 = ukuran perusahaan

X_7 = leverage

e = error

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yang terdiri dari variabel dependen yaitu Penghindaran pajak (Y). variabel independen yaitu kepemilikan institusional (X_1), kualitas audit (X_2), komisaris independen (X_3), komite audit (X_4), karakter eksekutif (X_5), ukuran perusahaan (X_6) dan leverage (X_7).

Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak yaitu usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus

dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan proksi *Book Tax Gap (BTG)*. *Book Tax Gap (BTG)* merupakan selisih antara laba sebelum pajak (laba akuntansi) dengan penghasilan kena pajak (laba fiskal) (Bovi, 2005 dalam Fadhilah, 2014). Proksi *book tax gap* dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$BTG = EBT - \text{Laba kena pajak}$$

Kepemilikan Institusional (X_1)

Yaitu kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management, dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan saham institusional dilambangkan dengan INST. Menurut Annisa, Ratnawati, dan Sofyan (2012) dalam Jaya, dkk (2013) komposisi kepemilikan saham institusional dihitung dengan rumus:

$$KI = \frac{\text{Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang diterbitkan}}$$

Kualitas Audit (X_2)

Adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Kualitas audit dilambangkan dengan AUDIT. Untuk penelitian ini perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* yaitu *Price Waterhouse Cooper-PWC*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *KPMG*, *Ernst & Young-E&Y* akan diberi nilai 1, dan apabila tidak diaudit oleh keempat Kantor Akuntan Publik (KAP) di bawah lisensi KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0 (Fadhilah, 2014).

Komisaris Independen (X_3)

Adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal

perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Prakosa, 2014). Komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan (Andriyani, 2008 dalam Prakosa, 2014). Komisaris independen dilambangkan dengan INDP.

Komite Audit (X₄)

Adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan. Proksi komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite dalam suatu perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013 dalam Prakosa, 2014). Komite audit dilambangkan dengan KOMITE.

Karakter Eksekutif (X₅)

Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan risiko perusahaan (*corporate risk*) yang dimiliki perusahaan (Paligrova, 2010) dalam Budi dan Setiyono (2012). *Corporate risk* mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Oleh Paligrova (2010) dalam Budi dan Setiyono (2012) untuk mengukur resiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total asset perusahaan.

Ukuran Perusahaan (X₆)

Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aktiva, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan

cenderung berkesinambungan antar periode. Ukuran perusahaan dilambangkan dengan SIZE. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan *natural logaritma* total aset dengan rumus sebagai berikut:

$$Size = Ln (total aset)$$

Leverage (X₇)

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *leverage* diukur dengan *total debt to equity* (DER) dengan rumus :

$$DER = \frac{Total Liabilitas}{Total Ekuitas}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah hipotesis yang dikembangkan dapat dibuktikan secara empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2012- 2016. Setelah seleksi dilakukan berdasarkan kriteria maka didapat sampel sebanyak 6 perusahaan yang dapat dijadikan sampel penelitian dengan tahun pengamatan selama 5 tahun sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 30 perusahaan.

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

	N	Mini mum	Maxi mum	Mea n	Std. Deviat ion
Penghindaran Pajak	30	10339	1058 9246 5	164 406 49	27104 163
Kepemilikan Instiusional	30	0.018 66	0.97	0.56 0.72 3	0.2942 876
Kualitas Audit	30	0	1	0.66 666 67	0.4794 633
Komisaris Independen	30	0.333 33	0.6	0.46 111 0.83	0.1148 336
Komite Audit	30	0	1	333 33	0.3790 49

Karakter Eksekutif	30	0.00252	0.31127	0.1293443	0.0841065
Ukuran Perusahaan	30	12.66235	28.59297	19.335093	6.1156309
Leverage	30	0.27244	3.76867	1.0181873	0.9271232
Valid (listwise)	N 30				

Sumber : Data Olah SPSS, 2018.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata 0.5607230. Nilai maksimum variabel kepemilikan institusional sebesar 0.97000 dimiliki oleh. Sedangkan, nilai minimum variabel kepemilikan institusional sebesar 0.01866. Nilai standar deviasi untuk data kepemilikan institusional adalah sebesar 0.29428761.

Kualitas Audit dalam penelitian ini menggunakan variabel *dummy*. Jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP *Big 4* yaitu Price Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y akan diberikan nilai 1, sedangkan jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP non *Big 4* maka akan diberikan nilai 0. Data kualitas audit memiliki nilai rata-rata sebesar 0.6666667. Nilai maksimum variabel kualitas audit sebesar 1. Nilai minimum variabel kualitas audit sebesar 0. Nilai standar deviasi untuk data kualitas audit adalah sebesar 0.47946330.

Komisaris Independen diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan jumlah seluruh dewan komisaris dan dikali 100% memiliki nilai rata-rata 0.4611100. Nilai maksimum variabel komisaris independen sebesar 0,60000. Nilai minimum variabel komisaris independen sebesar 0.33333. Nilai standar deviasi untuk data proporsi komisaris independen adalah sebesar 0.11483360.

Komite Audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yang bernilai 1 jika komite audit berjumlah 3

anggota dan bernilai 0 jika komite audit kurang dari tiga anggota, memiliki nilai rata-rata sebesar 0.8333333. Nilai maksimum variabel komite audit sebesar 1. Nilai minimum variabel komite audit sebesar 0. Nilai standar deviasi untuk data komite audit adalah sebesar 0.237904902.

Karakter Eksekutif memiliki nilai rata-rata sebesar 0.1293443. Nilai maksimum variabel karakter eksekutif sebesar 0,31127. Nilai minimum variabel karakter eksekutif sebesar 0,00252. Nilai standar deviasi untuk data karakter eksekutif adalah sebesar 0.08410651.

Ukuran Perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 19,3350930. Nilai maksimum variabel ukuran perusahaan sebesar 28,59297 6. Nilai minimum variabel ukuran perusahaan sebesar 12,66235. Nilai standar deviasi untuk data ukuran perusahaan adalah sebesar 6,11563093.

Leverage memiliki nilai rata-rata sebesar 1,0181873. Nilai maksimum variabel *leverage* sebesar 3,76867. Nilai minimum variabel *leverage* sebesar 0,27244. Nilai standar deviasi untuk data *leverage* adalah sebesar 0,92712320.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dihitung dengan menggunakan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan memiliki nilai rata-rata sebesar 16440649,13. Nilai maksimum untuk data *Tax Avoidance* sebesar 105892465. Nilai minimum data *Tax Avoidance* sebesar 10339. Nilai standar deviasi untuk data *Tax Avoidance* adalah sebesar 27104163,386.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai

residual yang terdistribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Kolmogorov Smirnov Test*. Kriteria pengambilan keputusan *Kolmogorov Smirnov Test* adalah apabila nilai signifikansi atau probabilitas > 0.05, maka residual memiliki distribusi normal dan apabila nilai signifikansi atau probabilitas < 0.05, maka residual tidak memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan model regresi bebas dari gejala multikolinieritas (Ghozali, 2013:106).

Uji Autokorelasi

Nilai Durbin-Watson (DW) yang dihasilkan dalam pengujian sebesar 1.989. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW hitung berada diantara -2 dan 2, yakni $-2 \leq 1,989 \leq 2$ maka ini berarti tidak terjadi autokorelasi. Sehingga kesimpulannya adalah uji autokorelasi terpenuhi.

Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas berarti varian variabel gangguan yang tidak konstan. Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2013: 139). Dalam penelitian ini, uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji *Glesjer*. Apabila nilai signifikan yang diperoleh > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 2
Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-64492.977	16756.7859		-0.385	0.704
Kepemilikan Institusional	81601.527	34295.056	0.886	2.379	0.026
Kualitas Audit	-23946.511	65492.876	-0.424	-2.298	0.028
Komisaris Independen	11611.8289	71914.952	0.492	1.615	0.121
Komite Audit	31256.478	21666.400	0.437	2.421	0.021
Karakter Eksekutif	77028.837	11564.9336	0.239	0.666	0.512
Ukuran Perusahaan	78453.8.94	51324.63.6	0.177	2.345	0.04
Leverage	-14599.49.4	69120.24	-0.05	-2.402	0.036

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Data Olah SPSS, 2018.

Berdasarkan tabel 2 diatas, persamaan regresi berganda yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$

Pembahasan

Hipotesis 1 (Kepemilikan Institusional)

Dari tabel 2 dapat dilihat, bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi 0.026 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $(2,379 > 2,0739)$ yang menunjukkan arah positif. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan "Kepemilikan Institusional berpengaruh

positif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)” **diterima**.

Argumentasi di atas didukung oleh penelitian Khoirunnisa Alviyani (2016) dan Ulfa Jasmine (2017) yang menemukan besar atau kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek (*short-term Shareholder*), maka akan meningkatkan penghindaran pajak, tetapi apabila semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka panjang (*long-term shareholder*) institusional, maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis 2 (Kualitas Audit)

Dari tabel 2 dapat dilihat, bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi 0.028 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Audit mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu ($-2.298 > 2,0739$) yang menunjukkan arah negatif. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan “Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)” **diterima**.

Argumentasi di atas didukung oleh penelitian Ayu Feranika (2015) yang menyatakan bahwa kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam The Big Four lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam Non The Big Four, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh

perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah kualitas audit maka dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak.

Hasil Pengujian Hipotesis 3 (Komisaris Independen)

Dari tabel 2 dapat dilihat, bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi 0.121 yang lebih besar dari nilai probabilitas 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Komisaris Independen tidak mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu $t_{hitung} (1,615 < t_{tabel} 2,0739)$. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan “Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*” **ditolak**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfajri (2016) banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris independen tidak mempengaruhi penurunan aktivitas *tax avoidance*. Penambahan anggota dewan komisaris independen hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat.

Hasil Pengujian Hipotesis 4 (Komite Audit)

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi 0.021 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu ($2.421 > 2,0739$) yang menunjukkan arah positif. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan “Komite Audit mempunyai pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*” **diterima**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Faisal Reza (2012) telah membuktikan bahwa

Komite Audit memiliki pengaruh yang bermakna terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa Alviyani (2016) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil Pengujian Hipotesis 5 (Karakter Eksekutif)

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi 0.512 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Karakter Eksekutif tidak mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu $(0,666 < 2,0739)$. Dengan demikian hipotesis kelima (H_5) yang menyatakan “Karakter Eksekutif tidak mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*” **ditolak**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Wayan dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018) yang menyatakan karakter eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena *principal* masih memiliki pengaruh yang besar dibandingkan dengan eksekutif dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan termasuk melakukan tindakan pajak agresif.

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa Alviyani (2016) yang menyatakan bahwa semakin eksekutif bersifat risk taker maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya. Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat risk taker yang lebih berani mengambil risiko.

Hasil Pengujian Hipotesis 6 (Ukuran Perusahaan)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi 0.040 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $(2,345 > 2,0739)$. Dengan demikian hipotesis keenam (H_6) yang menyatakan “Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*” **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Khoirunnisa Alviyani (2016) dan Melisa Fadila (2017) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk mengidentifikasi ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki aset yang besar juga dan semakin besar pula sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut untuk mengelola beban pajaknya.

Hasil Pengujian Hipotesis 7 (Leverage)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi 0.36 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *leverage* mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $(-2,402 > 2,0739)$ kearah negatif. Dengan demikian hipotesis ketujuh (H_7) yang menyatakan “*Leverage* mempunyai pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*” **diterima**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Jasmine (2017) bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, hutang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar hutang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan hutang oleh sebuah perusahaan.

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Melisa Fadila (2017) menyatakan bahwa sumber dana perusahaan dapat diperoleh dari pihak internal atau eksternal. Sumber internal berasal dari laba operasional yang dihasilkan perusahaan, sedangkan sumber eksternal diperoleh melalui pinjaman utang. Dana yang diperoleh melalui pihak eksternal atau utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan dana yang diperoleh dari pihak internal akan menimbulkan beban dividen yang tidak dapat menjadi pengurang laba kena pajak.

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil perhitungan analisis regresi diperoleh *Adjusted R Square* (R²) sebesar 0,438 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh faktor Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* sebesar 43,8%, sedangkan sisanya sebesar 56,2% menggambarkan variabel-variabel bebas lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kepemilikan Institusional menunjukkan nilai signifikansi 0.026 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05 dan dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu ($2,379 > 2,0739$) yang menunjukkan arah positif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
2. Kualitas Audit menunjukkan nilai signifikansi 0.028 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05 dan dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu ($-2,298 > 2,0739$) yang menunjukkan arah negatif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.
3. Komisaris Independen menunjukkan nilai signifikansi 0.121 yang lebih besar dari nilai probabilitas 0.05 dan dengan nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu ($1,615 < 2,0739$). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
4. Komite Audit menunjukkan nilai signifikansi 0.021 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 dan dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu ($2,421 > 2,0739$) yang menunjukkan arah positif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

5. Karakter Eksekutif menunjukkan nilai signifikansi 0.512 yang lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 dan dengan nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu ($0,666 < 2,0739$). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
6. Ukuran Perusahaan menunjukkan nilai signifikansi 0.040 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 dan dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu ($2,345 > 2,0739$) yang menunjukkan arah positif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
7. *Leverage* menunjukkan nilai signifikansi 0.036 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 dan dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu ($-2,402 > 2,0739$) yang menunjukkan arah negatif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada kategori perusahaan pertambangan. Sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Penelitian ini hanya menggunakan lima periode penelitian, yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2016.
3. Koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 43,8% menunjukkan bahwa masih banyak

variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* selain dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan, untuk peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian dengan topik yang sama disarankan untuk menambah variabel lain dan menggunakan periode pengamatan yang lebih lama sehingga diharapkan hasil penelitian akan menjadi semakin baik.
2. Bagi Direktorat Jendral Pajak ataupun Pemerintah sebaiknya melakukan pengembangan lebih lanjut dalam sistem perpajakan terutama mengenai peraturan perpajakan dan sistem pemeriksaan pajak yang bersih agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat dioptimalkan
3. Bagi investor hendaknya mempertimbangkan kualitas audit yang diprosikan dengan ukuran kantor akuntan publik, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit mempunyai pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*, laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya.
4. Bagi perusahaan agar dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang *Tax Avoidance*, sehingga manajemen perusahaan bisa merancang mekanisme pelaksanaan kelanjutan perusahaannya dengan baik, dengan tidak melakukan perencanaan pajak yang illegal sehingga perusahaan tidak melakukan kecurangan pajak (*tax*

evasion) yang dapat merugikan Negara dan dapat membuat nama dan reputasi perusahaan tersebut menjadi buruk dimata publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfajri, (2016). *Pengaruh Profitabilitas, Proporsi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fekon*, Universitas Riau.
- Alviyani Khoirunnisa, (2016). *Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fekon*, Universitas Riau.
- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Kurniasih, (2012). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No. 2, Mei 2012, hal 95-189.
- Budiman, Judi dan Setiyono, (2012). *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Electronic Theses & Dissertations (ETD) Univeritas Gajah Mada.
- Dewi Nurrahma, (2016). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2011-2013). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fekon*, Universitas Riau.
- Eksandy Arry, (2015). *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)*. Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Fadila Melisa, (2017). *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fekon*, Universitas Riau.
- Fadhilah, Rahmi, (2014). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*. Jurnal Universitas Negeri Padang.
- Feranika Ayu, (2015). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Dengan Tahun Pengamatan 2010-2014)*. Universitas Jambi.
- Hardelia, Medisa, (2015). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007-2010*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Jasmine Ulfa, (2017). *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang*

- Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fekon, Universitas Riau.*
- Jaya, Tresno Eka, M. Yasser Arafat, Dinda Kartika, (2013). *Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi Dan Tax Avoidance*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan. FE Universitas Negeri Jakarta.
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari, (2013) . *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance*. Buletin Studi Ekonomi, Volume 18 No.1, Februari 2013.
- Low, Angie, (2006). *Managerial Risk Taking Behavior And Equity Based Compensation*. Fisher college of business working paper September 2006, 03-003.
- Ngadiman dan Christiany Puspitasari, (2014). *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012*. Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 03, September 2014: 408-421.
- Prakosa, Kesit Bambang, (2014). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia*. SNA 17 Mataram.
- Rachmithasari, Annisa Fadilla, (2015). *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Republik Indonesia, 2008. *UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh*. Jakarta.
- Reza Faisal, (2012). *Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Rusli, Rini, (2014). *Skripsi: Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dimensi Tata Kelola Perusahaan Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak*. FE UR.
- Sari, Gusti Maya, (2014). *Pengaruh Corporate Governanace, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Peruaahan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008-2012)*. Jurnal UNP.
- Sugiyono, (2009), *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Surbakti, Theresa Adelina Victoria. (2012). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wayan I, (2018). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal KRISNA, Vol.10, No.1 Juli, Universitas Warmadewa. www.idx.co.id